

Pengaruh Kebijakan Subsidi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

Mirza Aldhia Asfar, Riko Setya Wijaya



Mirza Aldhia Asfar¹, Riko Setya Wijaya²; ¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya, 60294, Jawa Timur.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2023-05-12

Received in revised form 2023-24-12

Accepted 2024-23-01

Kata kunci:

Pengaruh Subsidi, Tingkat Kemiskinan, Jawa Timur

Keywords:

Effect Subsidies, Poverty Levels, East Java

How to cite item:

Mirza Aldhia Asfar, Riko Setya Wijaya. (2024).

Pengaruh Kebijakan Subsidi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Journal of Regional Economics Indonesia, 5(1).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan subsidi energi yang memuat subsidi listrik, subsidi LPG 3Kg, dan subsidi Raskin untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin benar-benar mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Metode pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Sampel yang digunakan merupakan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2017-2021. Hasil penelitian menginterpretasikan bahwa subsidi listrik memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, subsidi LPG memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan, sementara subsidi Raskin memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Melalui hasil penelitian, pemerintah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan dengan optimal.

This research aims to determine whether the government's efforts to provide energy subsidies, including electricity subsidies, 3 kg LPG subsidies, and Raskin subsidies to meet the needs of the poor, can significantly influence poverty levels in East Java. The approach method used is quantitative. The sample used is the poverty level in East Java Province during 2017-2021. The research results interpret that electricity subsidies have a significant negative effect on poverty, and LPG subsidies have an insignificant negative effect on poverty. In contrast, Raskin subsidies have a significant negative impact on poverty. Through research results, the government is expected to be able to meet the basic needs of the poor and ensure that available resources are allocated optimally.

* Mirza Aldhia Asfar, Riko Setya Wijaya.

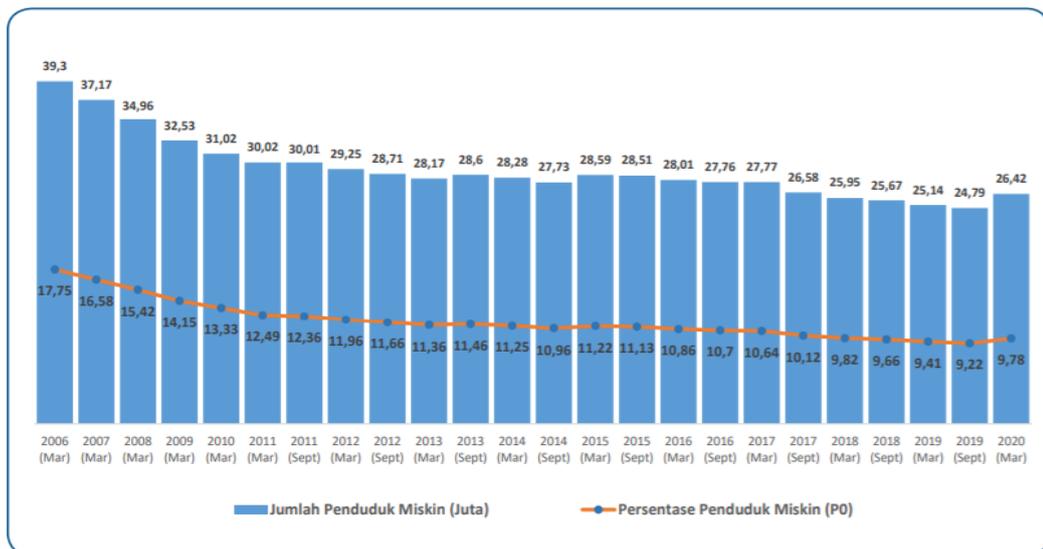
© 2024 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih berkonsentrasi pada pengentasan kemiskinan. Tidak ada persoalan yang lebih besar selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan penduduk tidak bisa menempuh pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya akses ke pelayanan publik, dan yang lebih parah menyebabkan jutaan penduduk kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Masalah kemiskinan bukan hanya dialami oleh negara yang sedang berkembang, bahkan sebuah negara yang maju pun memiliki permasalahan kemiskinan, namun tidak separah yang dialami oleh negara yang sedang berkembang (Rahmalia & Ariusni, 2019).

Gambar 01. Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 2006-2020



Sumber: BPS, 2021

Dari tahun 2011 hingga tahun 2019, jumlah penduduk maupun presentase kemiskinan di Indonesia selalu mengalami naik turun walau tidak signifikan, akan tetapi di tahun 2020 angka kemiskinan kembali naik sekitar dua juta penduduk miskin. Fluktuasi kemiskinan ini dilatar belakangi oleh beberapa indikator seperti (Astriani *et al.*, 2018): (i) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (ii) terbatasnya akses dan rendahnya dasar hidup masyarakat seperti akses lapangan pekerjaan; (iii)

kurang meratanya layanan pendidikan, kesehatan, air bersih; dan (iv) keamanan iklim berwirausaha bagi pelaku ekonomi lokal. Dari beberapa indikator tersebut, pemerintah harus ikut turut aktif dalam menuntaskan kemiskinan dengan memberikan beberapa bantuan atau kebijakan yang berpihak kepada masyarakat golongan bawah. Salah satu bentuk pengentasan kemiskinan adalah melalui pemberian berbagai jenis subsidi, salah satu contohnya adalah subsidi Listrik, subsidi LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg, dan Subsidi Raskin.

Subsidi listrik yang selama ini banyak tersorot mengenai kurang tepatnya sasaran, sebagian besar dana subsidi jatuh ke orang-orang yang mampu secara ekonomi. Hal lain karena kebijakan subsidi listrik saat ini adalah subsidi harga, sehingga semakin besar jumlah konsumsi listriknya semakin besar juga jumlah subsidi listrik yang dinikmati termasuk orang mampu (Rosyadah *et al.*, 2022).

Bantuan lain dari pemerintah yang terkemas dalam subsidi LPG 3Kg juga menjadi sorotan karena kurangnya ketepatan dalam segi sasaran sehingga menjadikan kurangnya efektif bantuan subsidi Lpg 3 Kg. Berdasarkan Undang- undang No 27 Tahun 2001 Tentang kegiatan usaha hilir gas, seluruh bisnis ataupun usaha minyak dan gas LPG sudah terbuka bagi pelaku usaha maupun kondisi di pasar yang menunjukkan bahwa industri ini memiliki potensi yang besar dan sekarang menjadi komoditi yang sangat penting bagi masyarakat.

Kebijakan atau program lain dari pemerintah adalah Raskin (Beras Miskin). Program Raskin merupakan wujud komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang sekaligus untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Program Raskin sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang didukung oleh Kepmenko Kesra Nomor 35 tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Ragam jenis kebijakan subsidi harus perlu diteliti lebih mendalam untuk memperkuat argumen apakah subsidi benar-benar mampu dan efektif dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini memfokuskan pada tiga jenis subsidi, yaitu subsidi listrik, LPG 3Kg, serta Raskin dengan kasus di Provinsi Jawa Timur.

2. Kemiskinan

Kemiskinan dipahami dengan indikasi pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang kompleks serta multidimensi. Di sisi lain, tingkat kehidupan yang rendah juga seringkali menjadi tolak ukur sebagai salah satu mata rantai yang muncul pada lingkaran kemiskinan (Sarkodie & Owusu, 2021). Kemiskinan juga dapat dipandang menjadi suatu hal yang absolut dan relatif. Kemiskinan merupakan salah satu masalah ketidakmampuan dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar yang standarnya di atas aspek kehidupan. Kemiskinan berhubungan dengan tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mampu untuk bersekolah, tidak mampu berobat ke dokter ketika sakit dan tidak mengerti tentang baca maupun tulis. Kemiskinan juga diartikan sebagai penggangguran yang tidak mempunyai suatu pekerjaan sehingga hal itu menyebabkan rasa takut untuk menatap masa depan hidupnya. Kemiskinan juga merupakan ketidakberdayaan serta kurangnya kebebasan untuk hidupnya. Kemiskinan juga diartikan suatu kekurangan, dimana seringkali diukur dengan tingkat kesejahteraan dari seseorang (Purwanto, 2007).

Menurut Pertiwi & Hardiyanti (2022), bahwa secara umum pengertian kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam lima kelas. *Pertama* adalah kemiskinan absolute, yaitu kondisi dimana seseorang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan. *Kedua* adalah kemiskinan relatif, yaitu sebuah kondisi dimana seseorang memiliki penghasilan namun tidak lebih besar daripada yang lainnya. *Ketiga* adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan karena prinsip dan sikap seseorang atau sekelompok orang yang tidak mau melakukan usaha untuk memperbaiki taraf kehidupannya meski ada pihak yang bersedia membantu. *Keempat* adalah kemiskinan kronis, yaitu terjadi akibat beberapa hal di luar individu tersebut yang menghambat proses memperbaiki taraf kehidupannya. Ragam pengaruh diantaranya adalah rendahnya taraf pendidikan, keterbatasan sumberdaya, keterisolasian, rendahnya kualitas kesehatan, dan kurangnya lapangan pekerjaan. *Kelima* adalah kemiskinan sementara, yang disebabkan oleh perubahan siklus ekonomi sebuah negara, dari kondisi normal menjadi krisis seperti rendahnya akses sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan.

3. Subsidi Listrik

Subsidi listrik diberikan dengan tujuan agar ketersediaan listrik dapat terpenuhi, kelangsungan penyediaan listrik dapat berjalan stabil, serta membantu pelanggan yang kurang mampu dan masyarakat yang belum terjangkau pelayanan PT. PLN (Persero). Namun demikian, ada satu pertanyaan klasik yang sering muncul berkaitan pemberian subsidi ini, yaitu apakah subsidi tersebut telah membantu masyarakat miskin karena sampai saat ini subsidi diberikan kepada hampir semua pelanggan PLN. Selain itu, subsidi listrik juga diduga lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga kaya. Isu tersebut disebabkan kebijakan subsidi listrik saat ini adalah subsidi harga, sehingga semakin besar jumlah konsumsi listriknya maka semakin besar juga jumlah subsidi yang dinikmati (TNP2K, 2021).

Adapun korelasi antara subsidi listrik dengan tingkat kemiskinan adalah sangat berpengaruh. Faktor yang menjadi sorotan utama yaitu mengenai kurang tepatnya sasaran penerima subsidi listrik, sehingga konsumen utama ataupun target sasaran dari subsidi listrik tidak merasakan dengan maksimal. Hal ini menyebabkan anggaran subsidi serta pagu dari pemerintah juga bisa disimpulkan kurang efektif (Rosyadah, *et al.*, 2022).

4. Subsidi LPG 3 Kg

Subsidi LPG 3 Kg diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2008 sebagai bagian dari Program Konversi Minyak Tanah ke LPG. Motivasi utama dalam melaksanakan program ini untuk mengurangi subsidi minyak tanah, yang telah meningkat lebih dari empat kali lipat antara tahun 2001 dan 2008, dan beralih ke bahan bakar bersih dengan polusi udara dalam ruangan yang lebih rendah. Harga LPG (per keluaran energi) lebih rendah dan distribusinya relatif mudah. Pemerintah Indonesia mendorong substitusi minyak tanah dengan cara menyediakan paket perdana LPG gratis dan harga subsidi untuk isi ulang. Pada dasarnya program ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi minyak tanah dengan tetap melindungi konsumen dari guncangan ekonomi, mengingat upaya sebelumnya untuk mengurangi konsumsi dengan meningkatkan harga minyak tanah pernah mengakibatkan friksi sosial dan instabilitas politik. Secara keseluruhan, program ini berhasil menurunkan penggunaan minyak tanah sebesar lebih dari 93% antara tahun 2008 hingga 2016

(*Annual Report on the OECD Guidelines*, 2019).

Menurut data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), konsumsi LPG meningkat signifikan, dan pada tahun 2015 LPG telah menjadi bahan bakar memasak utama bagi 69% rumah tangga, dari yang semula hanya 11% pada tahun 2007. Kemudian PT. Pertamina (Persero) mengeluarkan produk dengan varian kemasan baru berupa LPG (tabung) 3 kg, yang disubsidi penuh oleh pemerintah agar konsumen minyak tanah beralih ke LPG tabung 3 kg. Pendistribusian LPG tabung 3 kg diawali dengan pemberian secara gratis kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro (Aryani & Syarvina, 2022).

5. Subsidi Raskin

Program beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu penyediaan kebutuhan pangan pokok keluarga miskin. Melalui pelaksanaan program Raskin bersama program penanggulangan kemiskinan lainnya, diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga (Utami, 2017).

Program Raskin merupakan salah satu program yang diandalkan pemerintah dengan membantu penyediaan sebagai kebutuhan pangan pokok keluarga miskin berupa beras yang disebut dapat turut menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia. Namun terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu efektivitas program Raskin menurut Mufiddatul (2022) menunjukkan hasil yang masih belum efektif. Hal tersebut ditandai dengan sosialisasi dan transparansi yang kurang memadai seperti target penerima, harga, jumlah, dan frekuensi penerimaan beras yang masih kurang.

6. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu menggunakan *tools* untuk mengumpulkan data sehingga dapat diperoleh untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan (Sugiono, 2015). Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan total 29 kabupaten dan 9 kota. Tahapan penelitian dimulai

dengan pengumpulan data sampai dengan tahap penulisan. Kurun waktu yang di ambil dalam adalah selama 11 tahun, mulai dari tahun 2010 hingga 2020.

Metode analisis yang dipakai dengan menggunakan Analisis Inferensial melalui paket program SPSS. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi linier berganda, yang ditujukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variable dependen. Model ini menunjukkan hubungan spesifik antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Bentuk dari persamaan regresi analisis dapat dituliskan sebagai berikut (Ghozali, 2018):

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Tingkat Kemiskinan	X1	= Subsidi Listrik
X2	= Subsidi LPG	X3	= Subsidi Raskin
β_0	= Konstanta	$\beta_{1,2,3}$	= Koefisien Regresi
E	= Error		

7. Hasil Pembahasan

a. Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2008), uji asumsi klasik merupakan persyaratan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut pada uji hipotesis. Pengujian asumsi klasik bertujuan agar mampu menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*).

a) Uji Multikolinieritas

Uji ini untuk melihat apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Gejala multikolinieritas dapat diketahui dengan melihat nilai dari Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi atau gejala multikolinieritas antar variabel bebas. Dikatakan tidak terdapat korelasi jika nilai Tolerance ≥ 0.10 dan nilai VIF ≤ 10 .

Tabel 01.1 Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.443	.489		27.514	.000		
	Subsidi Listrik	-.050	.014	-.675	-3.616	.009	.331	3.017
	Subsidi LPG	-.012	.013	-.185	-.952	.373	.305	3.279
	Subsidi Raskin	.017	.005	.464	3.731	.007	.748	1.337

Sumber : Data Diolah (2024)

Dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan uji Multikolinieritas terhadap variabel independen, yakni Subsidi Listrik, Subsidi LPG, Subsidi Raskin menghasilkan nilai Tolerance ≥ 0.10 dan nilai VIF ≤ 10 . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

b) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui keadaan dimana di model regresi apakah terdapat hubungan antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model dapat dikatakan baik jika tidak terjadi autokorelasi. Untuk menguji adanya autokorelasi atau tidak, dengan menggunakan pengujian Durbin-Watson (DW) (Ghozali, 2018).

Tabel 02. Uji Autokorelasi DW (Durbin-Watson)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.959 ^a	.919	.885	.44249	1.727

Sumber : Data Diolah (2024)

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai uji Durbin Watson (DW test) (Ghozali, 2008) dengan menggunakan variabel bebas (k) berjumlah 3 dan jumlah (n) berjumlah 11 sehingga apabila dilihat pada tabel DW menunjukkan bahwa $dL = 0.525$ dan $dU = 2.016$. Sedangkan nilai DW dari hasil perhitungan adalah sebesar 1.727. Dari nilai DW yang dihasilkan menunjukkan bahwa nilai DW berada diantara dL dan dU yang artinya berada pada daerah keragu-raguan. Untuk memastikan apakah terdapat gejala autokorelasi atau tidak maka perlu dilakukan uji analisis Runs Test.

Tabel 03. Uji Autokorelasi Run Test

Unstandardized Residual	
Test Value ^a	.07465
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	6
Total Cases	11
Number of Runs	4
Z	-1.254
Asymp. Sig. (2-tailed)	.210

Sumber : Data Diolah (2024)

Pada uji runs test dikatakan tidak terdapat gejala autokorelasi apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari ($>$) 0.05. Dilihat dari hasil uji analisis runs test pada tabel 4.7 nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.210 yang berarti lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari gejala autokorelasi.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Glejser dengan meregresikan antara variabel independen dengan variabel absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan variabel absolut residualnya lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam pengujian (Ghozali, 2018).

Tabel 04. Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.411	.263		1.562	.162
	Subsidi Listrik	.006	.007	.595	1.053	.327
	Subsidi LPG	-.009	.007	-.803	-1.364	.215
	Subsidi Raskin	-4.978E-5	.002	-.008	-.020	.985

Sumber : Data Diolah (2024)

Berdasarkan Uji Heteroskedastisitas yang menggunakan uji Glejser, diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel Subsidi Listrik, Subsidi LPG, dan Subsidi Raskin lebih besar dari 0.05 sehingga dapat diartikan bahwa ketiga variabel tersebut dengan nilai residual tidak memiliki korelasi dan dapat dikatakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah model analisis yang digunakan dalam menganalisis pengaruh yang telah disebutkan dalam hipotesis dengan bantuan program pengolahan data IBM SPSS Statistics versi 25.

Tabel 05. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	13.443	.489		27.514	.000
	Subsidi Listrik	-.050	.014	-.675	-3.616	.009
	Subsidi LPG	-.012	.013	-.185	-.952	.373
	Subsidi Raskin	-.017	.005	.464	3.731	.007

Sumber : Data Diolah (2024)

Berdasarkan hasil pengolahan, dapat diperoleh model persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemiskinan} = 13,443 - 0,050 \cdot \text{Sub. Listrik} - 0,012 \cdot \text{Sub. LPG} - 0,017 \cdot \text{Sub. Raskin} + e$$

Dari model persamaan regresi linier tersebut di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a) Konstanta (β_0)

Nilai konstanta (β_0) sebesar 13,443 menunjukkan apabila variabel Subsidi Listrik (X1), Subsidi LPG (X2), dan Subsidi Raskin (X3) konstan maka besarnya Kemiskinan (Y) sebesar 13,443.

b) Koefisien Regresi Listrik (β_1)

Besarnya nilai koefisien regresi (β_1) sebesar -0,050, koefisien (β_1) bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan antara variabel Subsidi Listrik (X1) dengan Kemiskinan (Y), yang artinya jika Subsidi Listrik (X1) berkurang satu rupiah, maka Kemiskinan (Y) akan naik sebesar 0,050.

c) Koefisien Subsidi Subsidi LPG (β_2)

Besarnya nilai koefisien regresi (β_2) sebesar -0,012, koefisien (β_2) bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan antara variabel Subsidi Listrik (X2) dengan Kemiskinan (Y), yang

artinya jika Subsidi Listrik (X2) naik sebesar satu rupiah, maka besarnya nilai Kemiskinan (Y) akan meningkat sebesar 0,012.

d) Koefisien Subsidi Raskin (β_3)

Besarnya nilai koefisien regresi (β_3) sebesar -0,017, koefisien bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Subsidi Raskin (X3) dengan Kemiskinan (Y), yang artinya jika variabel Subsidi Raskin (X3) naik sebesar satu rupiah maka Kemiskinan (Y) akan turun sebesar 0,017.

c. Uji t

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian dan belum tentu diterima. Maka dari itu, dilakukan pengujian untuk pembuktiannya.

Tabel 06. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.443	.489		27.514	.000
	Subsidi Listrik	-.050	.014	-.675	-3.616	.009
	Subsidi LPG	-.012	.013	-.185	-.952	.373
	Subsidi Raskin	-.017	.005	.464	-3.731	.007

Sumber : Data Diolah (2024)

Hasil analisis uji t diatas secara parsila keempat variable tersebut dapat di di interpretasikan sebagai berikut:

a) Subsidi Listrik Terhadap Kemiskinan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hasil t hitung untuk variabel subsidi listrik adalah -3,616 dan nilai signifikansi sebesar 0,009. Signifikansi sebesar 0,05 dengan df 7 diperoleh nilai t tabel sebesar 2,36462, sehingga nilai t hitung > t tabel yaitu -3,616 > -2,36462. Hasil uji tersebut menunjukkan jika H1 diterima, yaitu adanya pengaruh secara negatif dan signifikan antara subsidi listrik (X1) terhadap kemiskinan (Y).

b) Subsidi LPG Terhadap Kemiskinan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hasil t hitung untuk variabel subsidi LPG adalah -0,952 dan nilai signifikansi sebesar 0,373. Signifikansi sebesar 0,05 dengan df 7 diperoleh nilai t tabel sebesar 2,36462 sehingga nilai t hitung > t tabel yaitu -0,952 < -

2,36462. Hasil uji tersebut menunjukkan jika H₂ ditolak, yaitu adanya pengaruh secara negatif dan tidak signifikan antara subsidi LPG (X₂) terhadap kemiskinan (Y).

c) Subsidi Raskin Terhadap Kemiskinan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hasil t hitung untuk variabel subsidi Raskin adalah -3,731 dan nilai signifikansi sebesar 0,007. Signifikansi sebesar 0,05 dengan df 7 diperoleh nilai t tabel sebesar 2,36462 sehingga nilai t hitung > t tabel yaitu $-3,731 < -2,36462$. Hasil uji tersebut menunjukkan jika H₃ diterima, yaitu adanya pengaruh secara negatif dan signifikan antara subsidi Raskin (X₃) terhadap kemiskinan (Y).

d. Pengaruh Subsidi Listrik Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan nilai t sebesar -3,616 dan nilai signifikan 0,009. Hal ini berarti bahwa subsidi listrik memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Subsidi ini diimplementasikan sebagai upaya untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam lapisan ekonomi rendah. Namun, dampaknya terhadap kemiskinan bisa bersifat kompleks.

Secara teoritis, subsidi listrik dapat membantu meringankan beban biaya hidup langsung bagi rumah tangga miskin. Keterjangkauan harga memungkinkan masyarakat miskin mengalihkan penghematan pengeluaran listrik mereka ke kegiatan ekonomi yang lebih produktif atau dialihkan ke dalam bentuk tabungan. Pemerintah perlu memastikan bahwa subsidi tersebut tepat sasaran, mendorong efisiensi energi, dan tidak mengorbankan alokasi anggaran untuk sektor-sektor krusial lainnya. Selain itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas dan pembangunan ekonomi sehingga masyarakat tidak hanya mengandalkan subsidi untuk mengatasi kemiskinan.

Temuan tersebut memperkuat penelitian Christiani & Nainupu (2021) dan Rosyadah *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa adanya subsidi maupun akses listrik dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan secara signifikan karena dengan akses listrik bisa meningkatkan aktifitas produksi dari masyarakat yang tidak terbatas pada siang hari saja namun bisa juga pada malam hari.

e. Pengaruh Subsidi LPG Terhadap Kemiskinan

Hasil perhitungan menunjukkan nilai t sebesar -0.952 dan nilai signifikan $0,373$, yang menunjukkan bahwa subsidi LPG memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Meskipun subsidi LPG di Indonesia dirancang dengan niat baik untuk mengurangi beban biaya hidup masyarakat, dan dampaknya terhadap penurunan tingkat kemiskinan tidak selalu signifikan. Beberapa faktor dapat menjelaskan mengapa subsidi LPG mungkin tidak memberikan dampak yang besar dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ketidakterdistribusian subsidi dapat menyebabkan dampak yang tidak merata di antara masyarakat. Subsidi LPG mungkin tidak selalu mencapai sasaran yang tepat, dan ada risiko bahwa manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh mereka yang sebenarnya tidak membutuhkannya secara mendesak. Birokrasi yang kompleks dan kurangnya data akurat terkait kondisi ekonomi rumah tangga dapat menjadi hambatan dalam menyasar dengan efektif (Aryani & Syarvina, 2022).

Alokasi anggaran untuk subsidi LPG dapat menjadi beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Jika anggaran terlalu besar untuk subsidi energi, maka dapat mengurangi ruang fiskal untuk investasi dalam sektor-sektor kunci lain yang lebih langsung dapat mengurangi kemiskinan, seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, meskipun masyarakat mendapatkan subsidi, namun dampak jangka panjangnya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan mungkin terbatas. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Purwanto (2007) yang menyatakan bahwa subsidi LPG memiliki pengaruh yang signifikan.

f. Pengaruh Subsidi Raskin Terhadap Kemiskinan

Hasil perhitungan menunjukkan nilai t sebesar -3.731 dan nilai signifikan $0,007$. Hal ini berarti bahwa subsidi Raskin memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Subsidi Raskin dirancang khusus untuk memberikan bantuan kepada rumah tangga miskin. Program ini menyediakan akses terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau, memastikan bahwa kelompok-kelompok yang rentan secara ekonomi dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan memberikan bantuan pangan langsung kepada kelompok yang membutuhkan, subsidi

Raskin membantu meringankan beban biaya hidup masyarakat paling rentan (Mufiddatul, 2022).

Subsidi Raskin memberikan perlindungan sosial bagi kelompok miskin di tengah fluktuasi harga pangan global (Rahmalia & Ariusni, 2019). Harga beras yang stabil melalui subsidi membantu mencegah lonjakan biaya makanan yang dapat memberatkan rumah tangga miskin. Ini memberikan kepastian dan stabilitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan, memastikan bahwa kelompok miskin tidak terkena dampak negatif dari perubahan harga secara tiba-tiba.

Program subsidi Raskin memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan dan gizi masyarakat. Dengan memastikan akses terhadap beras yang terjangkau, program ini membantu menanggulangi masalah gizi buruk di kalangan kelompok miskin. Ketersediaan pangan yang memadai dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang rentan terhadap kekurangan gizi. Hal ini sejalan dengan penelitian Panggayuh (2013) dan Pratama (2017), yang menunjukkan efektivitas pengelolaan program Raskin sangatlah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat miskin.

8. Penutup

Kebijakan pemerintah dalam menerapkan subsidi menunjukkan hasil nyata bahwa subsidi listrik berpengaruh signifikan secara negatif. Pada subsidi LPG 3 Kg berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan subsidi Raskin berpengaruh signifikan secara negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu, berdasarkan hasil temuan diharapkan pemerintah dapat melakukan peninjauan ulang secara cermat terhadap kebijakan subsidi yang diterapkan, dengan tujuan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar mencapai sasaran yang tepat, yaitu masyarakat miskin yang memang membutuhkan bantuan tersebut. Upaya evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan subsidi, serta mengoptimalkan dampak positifnya dalam mengatasi masalah kemiskinan di daerah. Pemerintah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan dengan optimal.

Daftar Pustaka

- Annual Report on the OECD Guidelines. 2019. *Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational*.
- Aryani, I., & Syarvina, W. 2022. Distribution analysis and distribution of 3 kg LPG gas sales allocations (case study of Pt. Sintora Putra Gasindo). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan*, Vol. 3, No. 2, pp. 493-500.
- Astriani, V., Nooraeni, R., Ramdhan, D. A., Setyadi, D., & Wijaya, A. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan kemiskinan di kota samarinda. *Inovasi*, Vol. 8, No. 1, pp. 31-37.
- Christiani, N. V., & Nainupu, A. E. 2021. Pengaruh akses terhadap internet, listrik dan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2019. *Jurnal Statistika Terapan* Vol. 1, No. 1, pp. 37-52.
- Ghozali. 2008. *Structural Equation Modelling* (2nd ed.). Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mufiddatul, A., Alfia, A. & Hasan, U., & Afiliasi, A. K. 2022. Pengaruh Subsidi Raskin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Masyarakat di Jawa Tengah. *HIMIE Economics Research and Olympiad (HERO)*, pp. 276-281.
- Patama, N. M. 2017. Analisis Program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan. *JIPP : Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, pp. 8-17.
- Pertiwi, D. D., & Hardiyanti, W. 2022. Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Jawa. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, Vol. 19, No. 1, pp. 103-112.
- Purwanto, E. A. 2007. Mengkaji potensi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk pembuatan kebijakan anti kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 3, pp. 295-324.
- Rosyadah, A. K., Yulantias, A., Herawati, A. R., & . K. 2022. Analisis kepuasan masyarakat jenangan terhadap kebijakan subsidi listrik di masa pandemi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, pp. 39-45.
- Rahmalia, S., & Ariusni, M. T. 2019. *Pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran, dan kemiskian terhadap kriminalitas Di Indonesia*. Vol. 1, No. 1, pp. 21-36.
- Sarkodie, S. A., & Owusu, P. A. 2021. Kemiskinan di Indonesia pada saat pandemi Covid-19. *Kajian*, Vol. 26, No. 1, pp. 35-49.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- TNP2K. 2021. Transformasi subsidi listrik di Indonesia : tujuan dan usulan

- mekanismenya. *In Policy Paper (Naskah Kebijakan)*: Vol. I, pp. 1-82.
- Utami, I. S. 2017. Efektivitas pelaksanaan program raskin di Desa Manyarejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, Vol. 1, No. 1, pp. 1-11.